

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi begitu cepat mengakibatkan perubahan yang cukup besar terhadap dunia industri. Perubahan tersebut terlihat dari mesin-mesin yang mulai menggantikan peran manusia dalam proses produksi perusahaan. Revolusi ini menciptakan kapitalisme di dunia industri dimana uang memegang peranan yang penting. Hal tersebut akan menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Karena keuntungan telah menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga menuntut perusahaan untuk berlomba-lomba dalam menghasilkan keuntungan yang besar.

Menurut Mukhtaruddin et al. (2018) untuk menghasilkan keuntungan yang besar perusahaan seringkali mengurangi biaya-biaya operasional mereka dan melakukan eksploitasi alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan disebabkan oleh pengurangan biaya tersebut. Karena dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perusahaan tidak dapat terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Kegiatan operasional perusahaan yang tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia. Permasalahan yang akan timbul antara lain polusi, penggusuran paksa, kerusakan bentang alam, berkurangnya sumber daya akibat kegiatan eksploitasi perusahaan, tercemarnya sumber air oleh limbah hasil kegiatan perusahaan.

Permasalahan sosial dan lingkungan tersebut khususnya di Indonesia merupakan suatu pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan. Berdasarkan hasil riset *Global Alliance on Health and Pollution (GAHP)* pada tahun 2017 Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat polusi dengan jumlah kasus kematian sebanyak 232,9 ribu (GAHP, 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan lingkungan di Indonesia sudah berada pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Salah satu yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan tersebut adalah pembangunan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Sektor bangunan dan konstruksi menyumbang 33% emisi CO₂, 25% produk kayu, mengkonsumsi 17% air bersih dan menggunakan 40% – 50% energi dalam kegiatan pembangunan dan operasionalnya (*IEA Global status Report, 2018*).

Di Indonesia, sektor *property, real estate, and construction* mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai konstruksi yang dapat di selesaikan perusahaan konstruksi dari 1.143.405.231 pada tahun 2017 menjadi 1.271.891.332 di tahun 2018 (jutaan rupiah) (BPS, 2020). Pembangunan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahun sehingga kebutuhan akan tempat tinggal, tempat hiburan, tempat perbelanjaan, dan kawasan industri akan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kepadatan penduduk yang terjadi dari tahun 2016 – 2019. Berikut merupakan tabel laju pertumbuhan penduduk berdasarkan provinsi:

| Provinsi | Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km ²) | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| | 2019 | 2016 |
| SUMATERA UTARA | 200 | 193 |
| DKI JAKARTA | 15900 | 15478 |
| JAWA BARAT | 1394 | 1339 |
| JAWA TENGAH | 1058 | 1037 |
| DI YOGYAKARTA | 1227 | 1188 |
| JAWA TIMUR | 831 | 817 |
| BALI | 750 | 727 |
| KALIMANTAN TIMUR | 29 | 27 |
| SULAWESI SELATAN | 189 | 184 |

Sumber: Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) (2020)

Gambar I.1: Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2016 – 2019

Data di atas menunjukkan peningkatan kepadatan penduduk dalam beberapa provinsi yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia dengan DKI Jakarta sebagai provinsi terpadat kemudian diikuti dengan provinsi Jawa Barat dan Yogyakarta. Kepadatan penduduk di kota besar dapat diakibatkan oleh tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat urbanisasi tertinggi dari negara-negara di Asia (Kompas.com, 2018).

Peningkatan tersebut telah membuka peluang yang besar bagi industri *property, real estate, and construction* di Indonesia untuk terus berkembang. Industri *property, real estate, and construction* sebagai penanda bagaimana keadaan perekonomian suatu negara (Mohammad Hamim, 2019). Semakin meningkatnya industri *property, real estate, and construction* di suatu negara maka perekonomian di negara tersebut juga semakin berkembang. Sektor ini juga berperan sebagai pendorong perkembangan sektor lainnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Peran tersebut memicu terjadinya peningkatan pada pembangunan yang akan berdampak secara langsung pada lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan aktivitas sektor ini sangat berkaitan dengan kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pencemaran yang terjadi dikawasan industri jababeka.

PT Delta Logam Makmur yang beroperasi di kawasan industri jababeka telah melakukan pencemaran dengan membuang limbah hasil produksi ke saluran air. Dalam kasus tersebut PT Delta Logam Makmur dituding belum memiliki izin lingkungan dalam kegiatan operasionalnya. Padahal dari surat sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi PT Delta Logam Makmur sudah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap lingkungan namun belum dilakukan tindakan terhadap aktivitas tersebut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengatakan kasus ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah PT Delta Logam Makmur apabila tidak memiliki izin serta terbukti limbah yang dihasilkan mencemari lingkungan maka akan dilakukan tindakan (Reaksi Nasional, 2018).

Contoh kasus lainnya adalah yang terjadi pada proyek pembangunan meikarta yang tidak memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya dengan tidak memiliki izin amdal. Lippo Group sebagai pengembang mengakui telah melakukan kesalahan dengan membangun serta memasarkan produk sebelum memiliki izin amdal dan izim mendirikan bangunan. Pengakuan tersebut dilakukan setelah diadakannya diskusi antara pihak Lippo Group dengan Ombudsman. Padahal sebelumnya pihak Lippo Group tidak menanggapi setiap himbauan dan larangan

yang dilakukan Pemprov Jawa barat terkait pembangunan meikarta. Pihak Lippo *Group* sudah mengurus amdal proyek meikarta tetapi Pemprov Jawa Barat merekomendasikan untuk menghentikan proses tersebut karena diketahui pihak Lippo *Group* sudah membangun dan memasarkan melalui media massa tanpa memiliki izin sehingga dapat dikatakan proyek tersebut adalah *illegal* (Semangat News, 2018). Apabila perusahaan melakukan pembangunan tanpa memperhatikan tata ruang maka akan mengganggu keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan fenomena di atas masih terdapat perusahaan yang lalai terhadap tanggung jawabnya kepada sosial dan lingkungan. Seharusnya perusahaan *property, real estate and construction* lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan melakukan kegiatan operasional ditengah masyarakat.. Oleh karena itu diperlukan pengendalian untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Karena untuk dapat bertahan perusahaan tidak hanya dengan menghasilkan keuntungan yang besar namun juga dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial yang ada disekitarnya. Dengan kata lain perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada kreditor saja dengan menghasilkan laba yang besar namun juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu upaya perusahaan dalam mengatasi dampak negatif dari kegiatan operasionalnya dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas pasal 15 bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan melaksanakan

tanggung jawab sosial, maka perusahaan telah membuktikan perhatiannya terhadap keadaan lingkungan dan masyarakat yang ada disekitarnya. Bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan antara lain dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan akibat aktivitas perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan kepada para *stakeholder* sebagai akibat dari aktivitas operasional perusahaan (Ruroh & Latifah, 2018). Hal tersebut mengacu pada konsep *triple bottom line* yang dikembangkan oleh Elkington. Elkington berpendapat bahwa untuk dapat mempertahankan eksistensinya perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga harus memberikan kegunaan kepada masyarakat serta berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan (Santoso, 2016). Konsep ini muncul dari tuntutan masyarakat terhadap kesejahteraan dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan.

Konsep tersebut telah mengubah pandangan manajemen yang awalnya berfokus pada *single bottom line* saja yaitu perusahaan hanya mengejar keuntungan saja, namun juga harus memiliki kepedulian dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang berada di sekitar perusahaan. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka harus

memperhatikan *profit, people, and planet* (3P). Dengan konsep tersebut diharapkan perusahaan tidak hanya mementingkan investor dan kreditor saja namun juga dapat memperhatikan kepentingan karyawan, masyarakat, pelanggan serta lingkungan hidup yang ada disekitar perusahaan. Dengan demikian CSR juga dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan dikarenakan akan memberikan manfaat dikemudian hari.

Konsep tersebut sejalan dengan teori *stakeholders*. Dalam teori *stakeholders* perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat kepada para *stakeholders* (Larasaty et al., 2017). Kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung terhadap dukungan dari *stakeholders*. Oleh karena itu perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik dengan para *stakeholders* agar mendapat dukungan demi keberlanjutan perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan merupakan alat yang digunakan manajemen perusahaan untuk berkomunikasi kepada para *stakeholders*. Pengungkapan tersebut diharapkan mampu mencukupi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengungkapan tersebut merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada *stakeholders*.

Perusahaan perlu melakukan pengungkapan sebagai bukti komitmen perusahaan dalam menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitarnya yang ditunjukkan kepada *stakeholders*. Dengan melakukan pengungkapan informasi mengenai kontribusi perusahaan terhadap sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa

perusahaan telah melaksanakan aktivitasnya dan juga tetap memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Permasalahan sosial dan lingkungan mulai menjadi sorotan *stakeholders* karena munculnya berbagai dampak yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan sehingga menimbulkan tuntutan dari para *stakeholder* untuk lebih peduli terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan *stakeholders* mulai menyadari betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan yang menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR (Felicia & Rasmini, 2015). Semua informasi mengenai CSR tersebut digabungkan menjadi sebuah laporan. Laporan tersebut digunakan sebagai media komunikasi antara manajemen perusahaan dengan *stakeholders*. Laporan tersebut harus dibuat sesuai kebutuhan *stakeholder* agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar (Anggraeni & Djakman, 2017).

Seiring berkembangnya teknologi informasi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait aktivitas perusahaan, salah satunya adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi yang diungkapkan perusahaan dapat menjadi nilai tambah perusahaan di mata masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan apabila melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain perusahaan dapat memperkuat *brand* sehingga mampu meningkatkan penjualan, meningkatkan reputasi perusahaan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya tarik perusahaan dikalangan investor (Manurung et al., 2017).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi hal yang wajib di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas. Dalam peraturan tersebut perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengungkapan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Meskipun sudah menjadi suatu kewajiban namun belum memiliki standar dalam pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga masih terdapat perusahaan yang lalai terhadap pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kendati demikian, menurut Abdurachman & Gustyana (2019) di Indonesia banyak yang menggunakan standar yang di tetapkan *Global Reporting Initiative* (GRI). *Global Reporting Initiative* adalah organisasi yang memelopori pengungkapan laporan keberlanjutan. Pedoman yang ditetapkan oleh GRI ini merupakan pedoman yang paling banyak digunakan karena pedoman tersebut dirancang secara *universal* agar sesuai dengan kondisi dan keadaan di seluruh dunia (Reporting Global Initiative, 2020). Dalam pedoman pelaporan GRI-G4 terdapat pengungkapan umum dan pengungkapan khusus. Standar yang digunakan untuk melihat CSR adalah pengungkapan khusus yang terdiri dari 3 kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pelaksanaan CSR digabungkan dalam sebuah laporan keberlanjutan dengan mengikuti *Guideline* GRI.

Namun, di Indonesia hingga sekarang tidak semua perusahaan melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain karakteristik dewam direksi. Dewan direksi merupakan salah satu komponen dari *corporate governance* yang memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan perusahaan. Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas pada pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa dewan direksi memiliki tanggung jawab serta wewenang dalam melaksanakan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Luas pengungkapan tentu tidak terlepas dari karakteristik pembuat keputusan. Selain itu direksi juga berperan dalam melindungi kepentingan perusahaan dan *stakeholders*. Salah satu karakteristik yang ada pada dewan direksi adalah keberagaman yang berkaitan dengan sikap, karakter dan keahlian yang dimiliki dewan direksi (Muttakin et al., 2016).

Keberagaman dalam dewan direksi mampu memberikan pandangan, pengetahuan serta opini yang lebih luas sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik (Hassan et al., 2020). Semakin beragam direksi diharapkan mampu mengatasi isu serta kepentingan *stakeholders*. Karakteristik dewan direksi yang dapat memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan antara lain keberagaman gender dan latar belakang pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Katmon et al. (2019) yang dilakukan di negara Malaysia bahwa gender, pengetahuan dan pengalaman merupakan karakteristik yang memengaruhi kualitas tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan dengan karakteristik lainnya. Selain itu faktor keuangan yang mampu memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah *leverage*.

Karakteristik dewan direksi yang pertama adalah diversitas gender. Diversitas gender dalam penelitian ini dilihat dari keberadaan dewan wanita dalam jajaran direksi dianggap memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan wanita memiliki karakteristik komunal yang lebih

baik daripada pria oleh karena itu wanita lebih memperdulikan kesejahteraan orang lain (Issa & Fang, 2019). Karakteristik tersebut yang dapat mempengaruhi dewan direksi untuk melakukan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta memperhatikan kepentingan para *stakeholders*.

Selain memiliki karakteristik komunal wanita dianggap lebih tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga kehadiran dewan direksi wanita mampu meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan wanita memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap pasar dan kosumen daripada pria (Rahindayati et al., 2015). Kinerja yang baik akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas.

Karakteristik selanjutnya yang dapat memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki direksi merupakan karakteristik kognitif yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan (Hadya & Susanto, 2018). *Board of directors* seharusnya terdiri dari para ahli dibidang akuntansi, perpajakan, keuangan, hukum (Rahindayati et al., 2015). Keberagaman latar belakang yang dimiliki direksi tersebut dapat menciptakan keunggulan bersaing hal ini dikarenakan perusahaan akan memiliki penilaian risiko serta pemahaman dunia bisnis yang lebih baik yang dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Dewan direksi yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan bisnis mampu menjaga keberlanjutan perusahaan melalui peningkatan reputasi dengan cara melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas demi memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan *stakeholders* (Pajaria et al., 2016).

Variabel selanjutnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah *leverage*. Menurut Ruroh & Latifah (2018) perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi cenderung akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang luas bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran kreditor terhadap pemenuhan hak mereka. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki risiko tinggi lebih memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan dibandingkan perusahaan dengan risiko yang rendah. Selain itu, apabila dikelola dengan baik utang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang baik maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa ketiga faktor tersebut mampu memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Uyar et al. (2020) menyebutkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan direksi mampu mendorong perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan wanita lebih peduli terhadap lingkungan disekitarnya, mampu memberikan pandangan dan kompetensi kepada anggota dewan lainnya untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Feng et al. (2020) menyebutkan adanya wanita dalam jajaran dewan direksi dapat meningkatkan kontribusi

perusahaan terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Karena dengan lebih banyaknya wanita dalam dewan direksi mampu mengurangi hambatan komunikasi serta cenderung menciptakan strategi yang berkelanjutan. Namun, penelitian Sektiyani & Ghozali (2019) menyebutkan keberadaan wanita di dalam dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan jumlah wanita yang sedikit sehingga mereka memiliki peran yang terbatas dalam penentuan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Mamun & Seamer (2020) menyebutkan perusahaan dengan dewan direksi yang memiliki keahlian bisnis akan lebih terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan direksi yang berlatar belakang bisnis lebih menyadari akan pentingnya dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan perusahaan. Selain itu, penelitian Rahindayati et al. (2015) juga menyebutkan latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan anggota direksi yang berlatar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis akan melakukan pengungkapan yang lebih luas demi meningkatkan reputasi perusahaan. Namun, penelitian Pajaria et al. (2016) menyebutkan latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan walaupun latar belakang dewan direksi berbeda-beda namun pengalamannya kurang sehingga tidak dapat memberikan opini, *skill*, dan pengalaman secara optimal.

Penelitian yang dilakukan Oktariyani & Meutia (2016) dan Ruroh & Latifah (2018) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Alasannya adalah perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi berarti mereka sangat bergantung pada kreditor oleh karena itu mereka lebih memiliki kewajiban dalam melakukan pengungkapan informasi. Hal tersebut berguna untuk menghilangkan kekhawatiran para kreditor serta membuktikan kepada masyarakat bahwa perusahaan juga telah melaksanakan tanggung jawabnya. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Riantani & Nurzamzam (2015) menyebutkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan hubungan baik yang terjalin antara perusahaan dengan kreditor mampu menghilangkan kekhawatirannya serta memiliki citra baik di mata investor. Apabila perusahaan memiliki *leverage* tinggi mereka berasumsi bahwa itu digunakan untuk keperluan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat berdampak baik bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait isu serta hasil penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, masih ditemukan perusahaan yang lalai serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu antara peneliti satu dengan yang lainnya. Hal tersebut yang mendorong dibutuhkan penelitian kembali terkait karakteristik dewan direksi dan *leverage*. Maka peneliti ingin mengajukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi dan *Leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah diversitas gender memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah latar belakang pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh diversitas gender terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Menguji pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan direksi dan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan di Indonesia, sehingga mampu menambah literatur dan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Berikut ini kegunaan praktis yang dapat diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

a. Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.

b. Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum menentukan investasi.

